

Edisi:

#04

Desember, 2016

PENGANGGARAN HIJAU NEWSLETTER

Memasukkan aspek lingkungan ke dalam proses penganggaran.

Tentang Edisi Ini

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bersama Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI) berupaya untuk mendorong efektivitas implementasi penganggaran hijau (green budgeting)—salah satu ujung tombak bagi Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Dengan berakhirnya tahun 2016, *deadline* target penurunan emisi karbon sebesar 26% di akhir tahun 2020 menjadi semakin dekat. LPEM FEB UI dan MCAI bersama dengan pemerintah daerah terus memacu pelaksanaan kegiatan demi kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. Hingga Desember 2016, LPEM telah menyelenggarakan *baseline survey* untuk melihat kesiapan pemerintahan daerah serta menyelesaikan *technical assistance* di empat provinsi target.

Yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan penganggaran hijau adalah pemerintah tingkat propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, karenanya LPEM melaksanakan survei yang ditujukan kepada instansi pemerintah daerah di empat provinsi yaitu Jambi, NTB, NTT, dan Sulawesi Barat. Survei tersebut akan menangkap sejauh mana kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan penganggaran hijau. Hasil dari survei tersebut dapat Anda baca pada edisi ini.

LPEM FEB UI telah melaksanakan *technical assistance* di Jambi. Bersama dengan pemerintah daerah, LPEM menganalisis cara apa yang paling efektif untuk mengatasi masalah kebakaran hutan yang selama bertahun-tahun telah merusak lingkungan hidup di Jambi. Hasil dari analisis tersebut beserta rekomendasi tindakan dari LPEM atas masalah tersebut juga dapat Anda temukan di edisi ini.

LPEM FEB UI juga membawa kabar gembira dari NTB. Dalam studi kasus krisis energi, tim *Technical Assistance* NTB telah melakukan kajian untuk meningkatkan kapasitas produksi listrik dari PLTMH Karang Santek di Kabupaten Bayan, Lombok Utara. Hasil dari penelitian beserta rekomendasi LPEM juga telah kami susun di edisi ini.

Selamat membaca,

Tim Peneliti

Menilik Kesiapan Pemerintah Daerah di Jambi dan NTB untuk Melaksanakan Penganggaran Hijau



NTB

Jambi

Readiness indicator survey di tingkat provinsi untuk NTB diisi oleh personel di Bappeda dan sembilan kantor dinas lokal. Responden diberi kuesioner yang terbagi dalam tujuh indikator, yaitu (1) Pengetahuan dasar tentang penganggaran hijau; (2) Pengetahuan tentang penganggaran dan pendanaan penganggaran hijau; (3) Komitmen internal SKPD; (4) Komitmen dan pengetahuan eksternal; (5) Koordinasi intra dan antar SKPD dan tingkatan pemerintahan; (6) Kapasitas internal SKPD; serta (7) Kerangka regulasi.

Dari segi internal, pemerintah daerah NTB dinilai memiliki komitmen yang cukup untuk melaksanakan penganggaran hijau, disertai pengetahuan dasar yang juga cukup, namun perlu ada peningkatan di bidang pengetahuan akan penganggaran dan keuangan hijau. Beberapa personel masih kurang familiar dengan pemahaman mengenai penganggaran hijau yang bisa berdampak pada implementasi yang salah sasaran. Kapasitas internal pemerintah daerah juga sudah dinilai cukup, namun Bappeda menyarankan diusahakannya peningkatan kapasitas terutama di bidang perencanaan dan penganggaran hijau, pembuatan dan revisi RAD-GRK, serta penghitungan emisi karbon di tiap sektor.

Dari segi eksternal, pemerintah daerah NTB memahami perlunya keterlibatan dari pihak di luar pemerintah untuk ikut berkontribusi, khususnya dari masyarakat yang belum banyak berinisiatif. Pemerintah juga menilai kerangka regulasi untuk pelaksanaan penganggaran hijau sudah ada, namun belum mencukupi. Koordinasi antar departemen masih lebih banyak dilaksanakan hanya untuk kepentingan penganggaran saja dan jarang untuk keperluan lainnya.

Sama seperti di NTB, *readiness indicator survey* di Jambi diwakili oleh responden dari Bappeda dan sembilan kantor dinas lokal. Hasil survei untuk provinsi Jambi adalah sebagai berikut.

Dari segi internal, pemerintah daerah Jambi dinilai telah memiliki komitmen yang cukup untuk melaksanakan penganggaran hijau, namun belum diimbangi dengan adanya pengetahuan dasar serta pengetahuan akan penganggaran dan keuangan hijau, karena skor survei menunjukkan kedua hal tersebut masih kurang. Pemerintah daerah sendiri menilai kapasitas internal mereka masih kurang, meskipun mereka sudah dapat mempersiapkan evaluasi dan pengawasan gas rumah kaca serta melakukan penghitungan emisi gas tersebut. Bappeda Jambi menambahkan bahwa pemerintah daerah juga perlu diberi tambahan pelatihan mengenai cara mempersiapkan dan merevisi RAD-GRK di level kabupaten.

Dari segi eksternal, pemerintah daerah Jambi telah memiliki koordinasi antar departemen yang mencukupi, baik antar pemerintah kabupaten maupun antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Kerangka regulasi untuk penganggaran hijau sudah ada, namun baru di tingkat provinsi, sehingga diperlukan juga kerangka regulasi di tingkat kabupaten. Pemerintah daerah juga memahami pentingnya pihak-pihak di luar pemerintahan untuk turut berperan dalam pelaksanaan penganggaran hijau, khususnya pihak regulator, meskipun merasa bahwa keterlibatan masyarakat untuk turut berkontribusi dalam pelaksanaan penganggaran hijau masih kurang. ■

Meredam Kebakaran Hutan di Jambi

Oleh:

Hendra Admaja (Bappeda Provinsi Jambi), Budi Prihatin (Dinas Kehutanan Provinsi Jambi), Junaidi B (Dinas Perkebunan Provinsi Jambi), Asrini (Fakultas Ekonomi STIE Muhammadiyah Jambi), Rahayu (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi) Zainal Arifin (Universitas Batanghari), Lili Yunita (LPEM FEB UI), Alvin Ulido Lumbanraja (LPEM FEB UI)

Jambi merupakan provinsi yang memiliki wilayah hutan terluas nomor 18 di Indonesia. Sayangnya, luasnya wilayah hutan yang dimiliki Jambi dibarengi dengan besarnya tingkat kerusakan hutan yang terjadi di provinsi ini. Selama tahun 2015, 19.528 hektar hutan mengalami kebakaran. Hal ini diperparah dengan banyaknya lahan gambut di Jambi, yang menyebabkan kebakaran yang terjadi di sana sulit untuk dipadamkan. Dari 19.528 hektar hutan yang terbakar tadi, 13.459 hektarnya terjadi di lahan gambut.

Pemerintah Provinsi Jambi telah mencanangkan berbagai program pencegahan kebakaran hutan, tiga di antaranya yaitu: 1) Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, 2) Pengelolaan Tahura (Taman Hutan Rakyat), serta 3) Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Alam, Dampak Lingkungan serta Percontohan Penerapan PLTB.

Program pertama, Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, merupakan program dimana personil pemerintah daerah melakukan patroli ke *hotspot* atau titik-titik rawan kebakaran hutan. LPEM menilai kegiatan ini layak dilakukan melalui CBA, karena manfaat dari api yang berhasil dipadamkan melebihi biaya yang dikeluarkan.

Pengelolaan Tahura merupakan program penanaman pohon karet sebagai salah satu upaya reboisasi sekaligus peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Sayangnya, kegiatan ini dianggap kurang layak dilakukan berdasarkan analisis CBA jika mengharapkan hasil ekonomi dalam jangka waktu pendek, karena pohon karet membutuhkan jangka waktu yang lama untuk tumbuh dan menjadi produktif. Meskipun begitu, program ini tetap memberikan kontribusi berupa penyerapan emisi karbon.

Program ketiga merupakan program dimana kelompok-kelompok tani di Jambi diberikan bimbingan untuk menanam karet. Sama seperti penilaian pada program sebelumnya, program ini tidak layak dilakukan jika ingin mendapatkan hasil ekonomi dalam waktu pendek dengan alasan yang sama. Namun, ada juga manfaat tidak langsung yang tidak dihitung dalam analisis, diantaranya adalah adanya bantuan alat-alat pertanian untuk masyarakat serta penyerapan emisi karbon melalui pohon yang ditanam.

Dari hasil analisis ini, Tim TA LPEM mengusulkan pada Pemerintah Provinsi Jambi untuk selalu memperhitungkan efektivitas dan efisiensi setiap program, menyusun anggaran dengan memperhatikan manfaat yang ingin dicapai, serta melakukan penambahan anggaran pada program yang terbukti memberikan manfaat. ■

Listrik untuk Kecamatan Bayan

Oleh:

Lalu Agus Jasmawadi (Bappeda Provinsi NTB)

Amrih Usodo (Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral KLU)

Christin Jiwan (Dinas Kehutanan KLU)

Gatot Putra Anom (Kantor Lingkungan Hidup KLU)

Lalu Husnul Habib (Bappeda KLU)

Soni Sanjaya (Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan KLU),

Anwar Fachry (P2KP Universitas Mataram)

Farma Mangunsong (LPEM FEB UI)

Nia Kurnia Sholihah (LPEM FEB UI)

Kecamatan Bayan merupakan kecamatan terluas kelima di Kabupaten Lombok Utara namun hanya memiliki rasio elektrifikasi sebesar 40% saja. Pasokan listrik dari PLN belum mampu menjangkau berbagai lokasi di daerah ini padahal, Kabupaten Lombok Utara memiliki beberapa sumber air yang cukup besar yang seharusnya bisa dimanfaatkan.

Karena sulitnya PLN masuk, solusi untuk menyalurkan listrik ke pedesaan NTB adalah dengan menggunakan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro). Salah satu PLTMH yang berhasil dioperasikan adalah PLTMH Karang Santek, yang terletak di Desa Bayan. PLTMH yang mulai beroperasi pada tahun 2008 ini mampu menghasilkan listrik sebesar 35.000 kwh, yang saat ini sudah dinikmati oleh 612 KK yang berada di Desa Bayan dan Desa Loloan. Listrik yang dihasilkan oleh PLTMH juga merupakan listrik yang ramah lingkungan, karena berasal dari tenaga air.

Meskipun begitu, PLTMH Karang Santek sendiri belum cukup untuk menearngi seluruh Kecamatan Bayan. Peningkatan kapasitas perlu dilakukan agar lebih banyak warga dapat mengambil manfaatnya terutama mengingat bahwa ada banyak sumber air di Kecamatan Bayan yang dapat dialirkan menuju PLTMH Karang Santek untuk memutar turbin tambahan. LPEM bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan membantu tim TA untuk menganalisis alternatif peningkatan kapasitas seperti apa yang akan memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat.

Setelah meninjau lokasi dan melakukan berbagai analisis, tim TA menyimpulkan bahwa PLTMH Karang Santek perlu diteruskan serta dioptimalisasi operasionalisasinya. Bersama dengan pemerintah daerah, alternatif optimalisasinya adalah meningkatkan kapasitas PLTMH Karang Santek menjadi 70.000 kwh dengan penempatan turbin baru di lokasi lain. Dengan melakukan *Cost Benefit Analysis*, Alternatif ini juga memberikan usulan untuk pencarian modal investasi yang paling tepat, yaitu dengan menggunakan dana hibah dari Pemerintah.

Keberadaan PLTMH Karang Santek tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan listrik masyarakatnya namun juga memberikan lapangan kerja serta meningkatkan kegiatan perekonomian lokal. Dari segi lingkungan, keberadaan PLTMH menyadarkan keberadaan masyarakat untuk menjaga kelestarian alam, karena listrik mereka bergantung pada debit air yang mengalir dari mata air.

Penambahan kapasitas PLTMH Karang Santek diharapkan tidak hanya menambah rasio elektrifikasi di Kecamatan Bayan namun juga dapat menjadi salah satu kontribusi masyarakat daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah terjadinya perubahan iklim bagi Indonesia. ■



Contact Person:

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat.

Telp. (021) 314-3177 Fax. (021) 319-343-10

Email: penganggaranhijau@lpe-feui.org | riatu.mariatul@ui.ac.id

penganggaranhijau@gmail.com

Tim Peneliti:

Riatu M. Qibtiyyah, Alvin Ulido Lumbanraja, Andhika Putra Pratama, Cita Wigioseptina, Devina Anindita, Farma Mangunsong, Ledi Trialdi, Lili Yunita, Nia Kurnia, Sulistiadi Dono Iskandar

Editor dan Desain: Yuanita Intan